

**PENGARUH TENAGA KERJA, TINGKAT PENDIDIKAN DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

SONNY ALHAMDI
05960/2008

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NERERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
PENGARUH TENAGA KERJA, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA BARAT

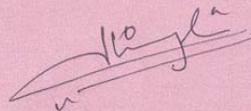
NAMA : SONY ALHAMDI
BP / NIM : 2008 / 05960
KEAHLIAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PRODI : EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Februari 2014

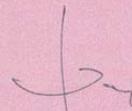
Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Mirna Tanjung, MS
NIP : 19491215 197703 2 001



Novya Zulva Riani, SE, M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan



Drs. Alianis, M.S
NIP , 19591129 198602 1 001

Halaman Pengesahan Lulus Ujian Skripsi

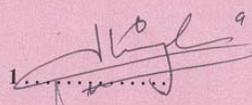
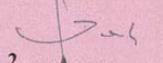
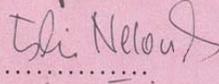
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH TENAGA KERJA, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

NAMA : SONNY ALHAMDI
BP / NIM : 2008 / 05960
KEAHLIAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PRODI : EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Februari 2014

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dra. Mirna Tanjung MS	1. 
2. Sekretaris	: Novya Zulva Riani, SE, M,Si	2. 
3. Anggota	: Dr. Idris, M.Si	3. 
4. Anggota	: Selli Nelonda, SE, M.Sc	4. 

SURAT PERNYATAAN
(Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana S1)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sonny Alhamdi
NIM/BP : 05960/2008
Tempat/ Tgl Lahir : Bukittinggi, 16 April 1990
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Inkorba, Bukittinggi
No. HP/Telp. : 085263590364
Judul Skripsi : Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Pengeluaran
Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di
Provinsi Sumatera Barat

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang,
Yang menyatakan



ABSTRAK

Sonny Alhamdi, (2008/05960): Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah Bimbingan Ibu Dra. Hj. Mirna Tanjung, MS dan Ibu Novya Zulva Riani, SE,M.si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 1) Pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat 2) Pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat 3) Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat 4) Pengaruh secara bersama-sama tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Jenis data yang digunakan pooling atau panel. Teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif dan induktif. Analisis induktif mencakup 1) Uji Hausman 2) Chow-Test 3) Analisis Model Regresi Panel, hasil memilih pada REM. Untuk melihat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan 1) Uji t dan 2) Uji F dengan taraf nyata 5%.

Hasil penelitian ini adalah 1) Tenaga Kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Sumatera Barat 2) Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Sumatera Barat 3) Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Sumatera Barat 4) Secara bersama-sama tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka disarankan, mengingat jumlah tenaga kerja tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukan program-program peningkatan kualitas SDM seperti pelatihan-pelatihan baik formal maupun informal oleh pemerintah daerah. Selain itu dalam upaya meningkatkan tingkat pendidikan, di butuhkan peran pemerintah melalui pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Puji Syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provisnsi Sumatera Barat** ”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan khususnya kajian ekonomi pembangunan serta untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terealisasinya skripsi ini tidak terlepas berkat bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Hj. Mirna Tanjung, MS dan Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si. selaku pembimbing I dan II yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan berupa kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana perkuliahan.
2. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S selaku ketua dan Ibuk Novya Zulva Riani, SE,M.Si selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi moril dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Idris M.Si dan Ibuk Selli Nelonda, SE, M.Sc selaku tim penguji sidang skripsi.
4. Bapak dan Ibu staf pengajar serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan pengetahuan dan proses administrasi yang bermanfaat selama masa perkuliahan.

5. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat beserta staf dan karyawan yang telah membantu dalam proses pengambilan data skripsi.
6. Dan teristimewa penulis persembahkan kepada ibunda dan ayahanda tercinta serta adik dan anggota keluarga yang telah memberikan do'a dan motivasi yang tak pernah henti-hentinya, demi terealisasinya cita-cita penulis dalam menyelesaikan studi ini dengan cepat.
7. Teman-teman se-angkatan 2008 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Hanya kepada Allah SWT penulis memohon semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang setimpal, Amin.....

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	16
1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	16
2. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	17
a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik.....	17
b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik.....	18
c. Teori Pertumbuhan Baru.....	19
3. Tenaga Kerja	20
4. Tingkat Pendidikan	22

5. Pengeluaran Pemerintah	28
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Pemikiran.....	33
D. Hipotesis	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Variabel Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Definisi Operasional Variabel.....	38
G. Teknik Analisi Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian	50
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	50
2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	55
a. Deskriptif Pertumbuhan Ekonomi.....	55
b. Deskriptif Jumlah Tenaga Kerja.....	57
c. Deskriptif Tingkat pendidikan.....	60
d. Deskriptif Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan.....	62
3. Analisis Induktif	65
a. Analisis Model Regresi Panel	65
1. Uji Hausman	65

2. Chows-Test (Likelihood Ratio Test)	66
3. Analisis Model Regresi Panel	66
b. Koefisien Determinasi (R^2)	69
c. Pengujian Hipotesis	70
B. Pembahasan	72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2012	3
2. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Usia 15 Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2012	5
3. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 –2012.....	8
4. Data Anggaran Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 -2012	11
5. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2012.....	53
6. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2012	56
7. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Usia 15 Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2012	58
8. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 –2012.....	61
9. Data Anggaran Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 -2012	63
10. Hasil Uji Chow Test.....	65
11. Hasil Uji Hausman	66
12. Hasil Estimasi Regresi Panel.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Halaman
1. Data Mentah	85
2. Data Diolah	88
3. Hasil Uji Chow	88
4. Hasil Uji Hausman.....	89
5. Hasil Uji Regresi Panel.....	90
6. Tabel T.....	91
7. Tabel F.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan *effect* yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan secara adil dan merata. Oleh karena itu, sudah sewajarnya peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional digunakan Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan untuk tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai umumnya ditandai dengan meningkatnya pendapatan nasional yang dapat dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB) yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan perkapita riil masyarakat dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan tenaga kerja yg memiliki produktifitas tinggi dan peran pemerintah dalam meningkatkan peroduktifitas tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang sangat dirasakan masyarakat dari kabupaten/kota di Sumatera Barat yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat Provinsi maupun di kabupaten/kota.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat pada periode studi mengalami fluktuasi dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi lain di Sumatera merupakan masalah yang menarik untuk dikaji mengingat sumber daya alam, prasarana penunjang relatif sama dibanding provinsi lain, bahkan letak Provinsi Sumatera Barat dinilai memiliki arti strategis tersendiri.

Untuk melihat besarnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dapat dilihat dari persentase PDRB masing-masing kabupaten/kotanya. Berikut disajikan data tentang pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Povinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2012 (dalam persen)

Daerah Kab/Kota	Pertumbuhan PDRB			Rata-rata
	2010	2011	2012	
Kab. Kep. Mentawai	4.88	4.92	5.25	5.02
Kab. Pesisir Selatan	5.28	5.48	5.66	5.47
Kab. Solok	6.05	6.13	6.26	6.14
Kab. Sijunjung	5.63	5.74	6.08	5.82
Kab. Tanah Datar	5.86	5.87	5.71	5.81
Kab. Padang Pariaman	5.14	5.50	6.03	5.56
Kab. Agam	5.68	5.94	6.82	6.15
Kab. Lima Puluh Kota	6.02	6.31	6.37	6.23
Kab. Pasaman	6.14	6.15	6.16	6.15
Kab. Solok Selatan	6.28	6.35	6.44	6.36
Kab. Dhamasraya	6.51	6.54	6.62	6.56
Kab. Pasaman Barat	6.39	6.42	6.47	6.42
Kota Padang	5.96	6.41	6.61	6.33
Kota Solok	5.96	6.07	6.33	6.12
Kota Sawahlunto	5.03	5.86	5.98	5.63
Kota Padang Panjang	6.05	6.14	6.24	6.14
Kota Bukittinggi	6.12	6.25	6.39	6.25
Kota Payakumbuh	6.38	6.79	6.82	6.66
Kota Pariaman	5.26	5.98	6.02	5.75
Rata-rata	5.82	6.05	6.22	6.03

Sumber : BPS Sumatera Barat 2012 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2010 – 2012 cenderung meningkat. Kota Payakumbuh, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera Barat, yaitu sebesar 6,66 persen yang berada diatas rata - rata pertumbuhan ekonomi keseluruhan daerah sebesar 6.03 persen. Selanjutnya rata-rata pertumbuhan ekonomi

tertinggi secara berturut-turut dicatat oleh Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Padang.

Kabupaten Kep. Mentawai, merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah di Sumatera Barat, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2010 - 2012 hanya sebesar 5,02 persen. Rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten Kep. Mentawai, kemungkinan disebabkan oleh belum stabilnya perekonomian kabupaten Kep. Mentawai pasca gempa tahun 2009 dan 2011. Berbedanya tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera barat, kemungkinan disebabkan ketersediaan faktor produksi yang berbeda tiap kabupaten/kota.

Tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan

mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah.

Berikut ini dapat kita lihat data jumlah tenaga kerja di Sumatera Barat yang tersaji dalam Tabel 2.

Tabel 2
Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Usia 15 Tahun Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2012 (dalam persen)

Daerah Kab/Kota	Pertumbuhan Tenaga Kerja			Rata-rata
	2010	2011	2012	
Kab. Kep. Mentawai	15.45	-15.45	16.74	5.58
Kab. Pesisir Selatan	-6.88	16.45	-13.23	-1.22
Kab. Solok	1.05	-7.98	-4.87	-3.94
Kab. Sijunjung	-8.89	4.40	-0.38	-1.62
Kab. Tanah Datar	0.03	-3.19	8.33	1.72
Kab. Padang Pariaman	-1.24	0.90	-2.39	-0.91
Kab. Agam	0.14	-3.18	11.83	2.93
Kab. Lima Puluh Kota	4.27	-8.41	12.24	2.70
Kab. Pasaman	0.38	-0.61	16.40	5.39
Kab. Solok Selatan	14.98	-2.47	-6.95	1.85
Kab. Dhamasraya	15.26	-3.02	6.60	6.28
Kab. Pasaman Barat	13.40	-5.20	-6.25	0.65
Kota Padang	2.55	19.31	-18.53	1.11
Kota Solok	-6.17	5.70	-1.15	-0.54
Kota Sawahlunto	27.32	-1.31	9.61	11.87
Kota Padang Panjang	-9.19	-7.94	1.41	-5.24
Kota Bukittinggi	-7.07	-1.31	6.68	-0.57
Kota Payakumbuh	7.36	-6.11	2.29	1.18
Kota Pariaman	7.30	2.38	-14.66	-1.66
Rata-rata	3.69	-0.90	1.25	1.35

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 (Data Diolah)

Pada Tabel 2 terlihat bahwa pertumbuhan jumlah tenaga kerja untuk seluruh kabupaten / kota di Sumatera Barat berfluktuasi setiap tahunnya. Dapat dilihat bahwa setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat memiliki rata - rata pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang berbeda – beda. Dimana daerah yang memiliki peningkatan rata-rata pertumbuhan tenaga kerja tertinggi adalah kota Sawahlunto, yaitu sebesar 11.87 persen yang jauh berada diatas rata-rata pertumbuhan jumlah tenaga kerja keseluruhan daerah sebesar 1.3 persen, sedangkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja paling rendah yakni kota Padang Panjang dengan jumlah tenaga kerja yang terus menurun dari tahun ke tahun, dengan total rata-rata pertumbuhan jumlah tenaga kerja sebesar -5.24 persen. Hal ini dimungkinkan karena kota Sawahlunto adalah salah satu pusat pertambangan batubara terbesar di Sumatera Barat sehingga penyerapan tenaga kerja tinggi dalam upaya untuk meningkatkan produksi pertambangan batubara.

Tabel 2 di atas juga memperlihatkan bahwa pada tahun 2011 kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan pertumbuhan jumlah tenaga kerja tertinggi yaitu sebesar -15.45 persen dan pada tahun 2012 kota Padang adalah daerah terbesar yang mengalami penurunan pertumbuhan jumlah tenaga kerja tertinggi sebesar -18.53 persen, tetapi jika dilihat pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan sebesar 4.92 persen, begitu juga kota Padang walaupun pada tahun 2012 pertumbuhan tenaga kerja mengalami penurunan tetapi laju pertumbuhan ekonomi kota Padang pada tahun 2012 meningkat sebesar 6,61. Hal ini dimungkinkan disebabkan oleh kondisi

tenaga kerja yang tersedia umumnya belum memenuhi tuntutan tenaga kerja yang berkualitas, sehingga tidak berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya.

Penurunan pertumbuhan tenaga kerja di beberapa kabupaten / kota di Sumatera Barat ini bertolak belakang dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Sumatera Barat. Hal ini secara teoritis bertentangan dengan teori yang ada dimana semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi begitupun sebaliknya. Sebagai sumber dalam peningkatan produksi barang dan jasa, maka peran tenaga kerja sangat dibutuhkan.

Salah satu indikator penting lainnya dalam pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pendidikan memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Terbatasnya sumber daya modal adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh kebanyakan negara berkembang dalam melaksanakan seluruh aktivitas perekonomian. Minimnya modal manusia membawa pada rendahnya produktivitas yang berakibat pada rendahnya pendapatan masyarakat. Keadaan ini akan terus berlangsung sampai ada upaya untuk meningkatkan pendidikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sampai pada tingkat yang tinggi.

Berikut ini dapat kita lihat data perkembangan rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat yang tersaji dalam Tabel 3.

Tabel 3
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten / Kota Di Sumatera Barat
Tahun 2010-2012 (dalam tahun)

Daerah Kab/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah			Rata-rata
	2010	2011	2012	
Kab. Kep. Mentawai	6.51	6.52	6.52	6.52
Kab. Pesisir Selatan	7.84	8.12	8.23	8.06
Kab. Solok	7.6	8.03	8.04	7.89
Kab. Sijunjung	7.43	7.50	7.51	7.48
Kab. Tanah Datar	8.35	8.40	8.41	8.39
Kab. Padang Pariaman	7.26	7.31	7.46	7.34
Kab. Agam	8.50	8.59	8.61	8.57
Kab. Lima Puluh Kota	7.94	8.00	8.01	7.98
Kab. Pasaman	6.61	7.66	7.87	7.38
Kab. Solok Selatan	7.82	7.84	7.86	7.84
Kab. Dharmasraya	7.77	8.24	8.24	8.08
Kab. Pasaman Barat	8.00	8.03	8.06	8.03
Kota Padang	10.91	10.92	10.94	10.92
Kota Solok	10.43	10.84	10.49	10.59
Kota Sawahlunto	9.14	9.23	9.42	9.26
Kota Padang Panjang	10.23	10.73	10.74	10.57
Kota Bukittinggi	10.50	10.58	10.59	10.56
Kota Payakumbuh	9.66	9.72	9.91	9.76
Kota Pariaman	9.90	9.92	9.93	9.92
Rata-rata	8.55	8.75	8.78	8.69

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 3 di atas, menunjukkan rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Kota Padang yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi dan meningkat dengan total

rata-rata selama 10.92 tahun yang berada diatas rata- rata dari perkembangan rata-rata lama sekolah dari kabupaten/kota lain di provinsi Sumatera Barat. Hal ini kemungkinan disebabkan kota Padang merupakan ibukota provinsi Sumatera Barat yang memiliki infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang sangat baik dalam menunjang pendidikan, sehingga semakin meningkatnya mutu dan kualitas SDM. Selanjutnya rata-rata lama sekolah tertinggi secara berturut-turut dicatat oleh kota Solok, kota Padang Panjang, kota Bukittinggi, dan kota Pariaman.

Sedangkan kabupaten Kep. Mentawai merupakan daerah yang memiliki rata-rata terendah dalam angka rata-rata lama sekolah selama 6.52 tahun. Hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya fasilitas pendidikan pada kabupaten Kepulauan Mentawai dibanding daerah lain di Sumatera Barat.

Tabel 3 di atas juga memperlihatkan bahwa selama periode 2010-2012 kota Padang merupakan daerah dengan rata-rata lama sekolah tertinggi di Sumatera Barat, tetapi nyatanya jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi daerah lainnya, Kota Padang berada di bawah Kota Payakumbuh, Kab. Dhamasraya, Kab. Solok Selatan, dan Kab. Pasaman Barat. Kesenjangan itu tentunya memperlihatkan, Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat yang banyak memiliki fasilitas pendidikan harusnya lebih maju dari daerah lain menjadi terelakkan, Karena peningkatan yang terjadi pada tingkat pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan terhadap barang-barang dan jasa secara keseluruhan dalam perekonomian. Keadaan tersebut akan mendorong produsen untuk lebih meningkatkan kegiatan produksinya terhadap barang-barang dan jasa untuk

memenuhi permintaan terhadap output yang dihasilkan. Dan meningkatnya output diharapkan akan mampu memenuhi permintaan sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada tingkat pendapatan.

Pertumbuhan Ekonomi yang diukur melalui PDRB juga tidak bisa lepas dari peran pemerintah. Pengeluaran pemerintah di provinsi Sumatera Barat yang digambarkan pada APBD pada prinsipnya bertujuan untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam APBD ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa biaya untuk pembangunan infrastruktur, salah satunya dibidang pendidikan sebagai penunjang kualitas sumber daya manusianya wajib dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk kebijakan pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan perekonomian daerah. Selain untuk membiayai infrastruktur dibidang pendidikan, pengeluaran pemerintah menjadi unsur penting dalam pembangunan manusia. Karena tanpa perhatian dari pemerintah, pembangunan secara keseluruhan tidak dapat tercapai. Pengeluaran pemerintah ini berfungsi untuk menyediakan infrastruktur dan pelayanan masyarakat yang akan menunjang kualitas sumber daya manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan suatu negara.

Berikut ini dapat kita lihat anggaran pengeluaran pemerintah daerah pada bidang pendidikan di Sumatera Barat dari tahun 2010 sampai tahun 2012 yang tersaji dalam Tabel 4.

Tabel 4
Data Anggaran Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2010-2012 (Juta Rupiah)

Kab/Kota	Tahun		
	2010	2011	2012
Kab. Kep. Mentawai	100.379	136.718	138.653
Kab. Pesisir Selatan	274.736	372.864	443.278
Kab. Solok	241.448	336.979	349.535
Kab. Sijunjung	154.456	229.967	238.223
Kab. Tanah Datar	250.363	308.240	342.207
Kab. Padang Pariaman	271.432	427.441	445.973
Kab. Agam	295.731	410.575	513.650
Kab. Lima Puluh Kota	268.800	357.000	374.457
Kab. Pasaman	160.537	230.605	274.633
Kab. Solok Selatan	101.848	140.048	152.483
Kab. Dharmasraya	144.313	171.178	174.371
Kab. Pasaman Barat	159.406	249.800	295.775
Kota Padang	458.541	586.140	662.785
Kota Solok	116.348	133.904	157.915
Kota Sawahlunto	80.247	118.301	118.156
Kota Padang Panjang	74.953	876.026	115.197
Kota Bukittinggi	118.053	124.569	156.831
Kota Payakumbuh	107.605	132.969	169.677
Kota Pariaman	108.695	158.499	161.027
Sumatera Barat	3.487.892	5.501.823	5.284.828

Sumber: <http://www.djpk.depkeu.go.id/>

Dari Tabel 4 terlihat bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan untuk seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan

di tahun 2010-2012, juga dapat dilihat bahwa setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat memiliki anggaran pengeluaran pemerintah yang berbeda-beda. Dimana daerah yang pengeluaran pendidikannya tertinggi adalah ibukota Sumatera Barat, yaitu kota Padang, sebesar Rp 662.784.623.171,71 pada tahun 2012 sedangkan pengeluaran pendidikan terendah adalah kota Padang Panjang sebesar Rp. 115.197.107.055 pada tahun 2012. Hal ini dikarenakan berbedanya pendapatan daerah di masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat sehingga anggaran belanja pemerintah juga berbeda di setiap daerah tersebut. Selain itu perbedaan aktivitas dan besaran belanja pemerintah di setiap kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat juga menjadi penyebab berbedanya anggaran pengeluaran pemerintah yang digunakan di masing-masing daerah tersebut.

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan di sini juga sangat mendukung dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dimana dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan modal utama bagi pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka menstabilkan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah merupakan anggaran bagi pemerintah untuk melaksanakan seluruh aktivitasnya guna mencapai kualitas sumber daya manusia yang diharapkan sebagai modal penggerak pembangunan daerah dan Nasional.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat akan meningkat apabila unsur-unsur pendukungnya dapat ditingkatkan. Dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat akan mampu mendukung kinerja

pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yakni keberhasilan pembangunan ekonomi serta pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Sumatera Barat dan nasional. Dengan kata lain terdapat korelasi positif antara meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan keberhasilan pembangunan ekonomi skala daerah dan nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : “ **Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat?
2. Sejauhmana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat?
4. Sejauhmana pengaruh tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat
2. Mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat
3. Mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat
4. Mengetahui bagaimana pengaruh tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Bagi penulis
Sebagai salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bagi pengambil kebijakan
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah dalam pertumbuhan ekonomi.

3. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai pertumbuhan ekonomi dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznets dalam Todaro (2004:99) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Menurut Sadono Sukirno (2002:10) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat, disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga semakin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat dari perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisis sehingga kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut ekonom Klasik, Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk dalam Lincoln Arsyad (2004:55). Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya.

Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik. Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi (Sadono Sukirno,2004). Unsur pokok dari faktor produksi suatu negara yaitu :

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya

alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.

2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
3. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Model Sollow merupakan pengembangan dari model Harrod-domar yang hanya memfokuskan pada pembentukan modal. Teori ini menambahkan faktor penentu pertumbuhan ekonomi berupa tenaga kerja dan teknologi. Namun teknologi dianggap sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi diasumsikan bersifat eksogen atau dipengaruhi oleh berbagai macam faktor (Todaro, 2000:116). Robert Sollow mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang disebut sebagai model pertumbuhan Sollow, model tersebut berangkat dari fungsi produksi agregat sebagai berikut dalam (Todaro, 2004:150).

$$Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

Y = produk domestik bruto

K = modal fisik dan modal manusia

L = tenaga kerja

A = produktifitas tenaga kerja

Model neo klasik Solow-Swan secara umum berbentuk fungsi produksi, yang bisa menampung berbagai kemungkinan substitusi antar kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Solow Neo Classical Growth Model*), pertumbuhan ekonomi tergantung kepada faktor-faktor produksi.

Dari persamaan di atas memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi terpusat pada masalah produksi. Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Solow Neo Classical Growth Model*), Pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh perubahan pada faktor-faktor produksi diantaranya tenaga kerja dan modal.

Faktor terpenting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi selain penambahan modal dan penambahan tenaga kerja, tetapi faktor yang tidak kalah pentingnya adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

c. **Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)**

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam system ekonomi. Menurut Romier dalam Todaro (2004:171), teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan

apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia.

Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal diperluas dengan memasukkan modal ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau eksogen tapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Mankiw, 2003:21).

3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja atau *men power* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force* terdiri dari golongan yang bekerja, golongan yang menganggur, dan golongan yang mencari pekerjaan. Menurut Subri (2003:57) adalah bagian tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja, karena itu sering disebut potensial *labor force* (Simanjuntak, 1998:3) dengan kata lain dapat digambarkan bahwa:

$$\text{Tenaga Kerja} = \text{Angkatan Kerja} + \text{Bukan Angkatan Kerja}$$

Menurut Rosyidi (2003:57) tenaga kerja adalah bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencakul, menggergaji, bertukang dan segala kegiatan fisik lainnya. Tetapi lebih luas lagi, yaitu *human resources* (sumber daya manusia). Dalam istilah ini tenaga manusia itu bukan saja terdiri dari kemampuan fisik atau tenaga jasmani tetapi juga kemampuan mental atau kemampuan non-fisiknya.

Menurut Adam Smith (Idris, 2007:4) manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tenaga kerja adalah bagian dari penduduk suatu negara yang dapat digunakan dengan faktor produksi lain untuk melakukan kegiatan produktif dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting untuk diperhatikan, karena tenaga kerja merupakan pusat penggerak dari keseluruhan kegiatan produksi, tanpa tenaga kerja semua aktivitas dipastikan tidak akan berjalan.

Hubungan Antara Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Todaro (2000:93) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.

Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan system perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut.

Menurut pandangan ahli ekonomi klasik dalam Sukirno (2000: 286) hubungan yang ditunjukkan antara tenaga kerja dan produksi nasional adalah positif yaitu semakin banyak tenaga kerja atau jumlah penduduk yang bekerja maka akan semakin tinggi produksi nasional tetapi apabila tenaga kerja sudah berlebih dibandingkan sumber ekonomi yang lain (tanah dan barang modal) penambahan penduduk dan tenaga kerja akan mengurangi produksi nasional.

Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

4. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan UU-SPN No 20 Tahun 2003 (Pasal 1 Ayat1) menerangkan bahwa pendidikan adalah:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

Sedangkan menurut Jhingan (2003:414) bahwa modal manusia yaitu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pendidikan dan latihan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi.

Meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar. Pendidikan dan latihan merupakan dua unsur yang saling terkait dan merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa di laksanakan secara sembarangan artinya diperlukan penanganan yang sejenis dan berencana karena melaksanakan pendidikan dan latihan memerlukan biaya yang besar, tetapi hasil yang diperlukan juga cukup besar dan kesalahan pahaman diperkecil.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi pula tingkat penghasilan tenaga kerja. Sehingga mengakibatkan pula perubahan terhadap produktifitas kerja. Peningkatan pendidikan atau keterampilan akan mampu meningkatkan keterampilan kerja atau produktifitas seseorang dalam bekerja, sehingga pendapatannya meningkat dan tingkat kesejahteraan juga akan meningkat.

Tingkat pendidikan masyarakat di ukur dari rata-rata lama sekolah karena dari rata-rata lama sekolah itu bisa dikatakan suatu kota/daerah memiliki tingkat pendidikan. Dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan yang lebih baik pada sektor moderen dimasa yang akan datang dan upah yang lebih baik dibanding dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka, pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi masyarakat.

Pendidikan seringkali menggambarkan berbagai hal yang paling potensial dari suatu masyarakat, bila struktur sosial dan ekonomi. Suatu daerah ternyata sangat tidak merata, maka sistem pendidikan akan mencerminkan keadaan tersebut dalam bentuk terbatas jumlah orang yang bisa menikmati jenjang pendidikan. Dalam waktu bersamaan bidang pendidikan dapat pula mempengaruhi bentuk dan arah perkembangan suatu masyarakat mendatang lewat berbagai jalan. Pendidikan merupakan upaya untuk mengantarkan manusia ke arah kedewasaan, melalui pendidikan masyarakat dapat kesempatan untuk membina kemampuan dan mengatur pola kehidupannya, perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bearti membuka kesempatan ekonomi untuk mengupayakan dan kemajuan hidup masyarakat untuk meningkatkan martabat kehidupan manusia.

Menurut Todaro (2000:406) pendidikan adalah kunci untuk menciptakan, mengadopsi untuk memperoleh ilmu pengetahuan, namun penyebaran kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan tersebut sangat tidak merata terutama bagi kalangan masyarakat miskin pendidikan merupakan upaya untuk menyatakan manusia ke arah dewasa melalui pendidikan masyarakat mendapat kesempatan untuk membina Kemampuan mengatur pola kehidupan dan membuka kesempatan untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan kehidupan masyarakat. Pendidikan merupakan langkah yang paling strategis dalam upaya mengatasi kemiskinan yang berkaitan erat dengan pendapatan rumah tangga.

Jika demikian masyarakat yang berpendapatan rendah. Sulit untuk mendapat kesempatan pendidikan yang sama, dengan konsekuensi bahwa pendidikan akan cenderung memperbesar jurang pendapatan dikalangan masyarakat. Pendidikan yang lebih baik akan dapat meningkatkan kompetensi dan produktifitas sumber daya manusia. Dalam upaya memperbaiki kualitas hidup. Secara ekonomi pendidikan dapat menjadi instrument untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan. Sedangkan secara sosial pendidikan menjadi jalan memperkuat masyarakat dan membuka wawasan demokratis.

Peningkatan pendidikan dan latihan merupakan bentuk usaha yang sangat ampuh memerangi kemiskinan. (Simanjuntak, 1998:77). Jadi, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi merupakan lingkaran yang saling mempengaruhi sekali perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi sebaliknya

dilain pihak, tingkat kemiskinan itu sendiri akan berpengaruh pula terhadap pola perkembangan pendidikan.

Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Simanjuntak (1998:77) pendidikan dan latihan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang nantinya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Ada banyak cara yang bisa dijadikan indikator untuk mengukur tingkat pendidikan disuatu daerah, diantaranya adalah rasio penduduk usia sekolah yang bersekolah, tingkat melek huruf, tingkat putus sekolah dan lain-lain (Todaro 2000:389).

Menurut Todaro (dalam Aini, 2008:20) pendidikan memang memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 6 cara yaitu:

1. Meningkatkan secara umum kualitas angkatan kerja melalui penanaman pengetahuan kerja dan keterampilan.
2. Meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan mempromosikan pembagian kerja.
3. Memungkinkannya penyerapan Informasi baru secara lebih cepat dan penerapan proses baru dan input yang kurang dikenal menjadi lebih efisien.
4. Menghilangkan hambatan hambatan sosial dan kelembagaan bagi pertumbuhan ekonomi.
5. Beraninya wirausahawan untuk mempromosikan tanggung jawab Individual, kemampuan organisasional, mengambil resiko yang moderat dan merencanakan dalam jangka panjang.
6. Meningkatkan kemampuan manajemen menjadi lebih sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien.

Untuk mengukur dan mengidentifikasi manfaat pendidikan secara keseluruhan sangat sulit untuk dilakukan, namun demikian beberapa aspek dari manfaat pendidikan dapat diidentifikasi dan diukur seperti manfaat ekonomi

dari pendidikan. Manfaat ekonomi dari pendidikan merupakan nilai tambah secara ekonomi karena bertambahnya tingkat pendidikan.

Individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tidak berpendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh.

Pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas untuk mendapatkan pendapatan. Investasi dalam modal manusia akan terlihat lebih tinggi manfaatnya apabila kita bandingkan antar total biaya pendidikan yang dikeluarkan selama menjalani pendidikan terhadap pendapatan yang nantinya akan diperoleh ketika mereka sudah siap bekerja. Orang-orang berpendidikan tinggi akan memulai kerja penuh waktunya pada usia yang lebih tua, namun pendapatan mereka akan lebih cepat naik dari pada orang yang bekerja dari awal. Maka strategi optimal bagi seseorang adalah menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin (Todaro, 2004:429).

Peningkatan dalam pendidikan memberi beberapa manfaat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu manajemen perusahaan-perusahaan modern yang dikembangkan semakin efisien, penggunaan teknologi modern dalam kegiatan ekonomi dapat lebih cepat berkembang, pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan daya pemikiran masyarakat

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dalam rangka mendorong dan meningkatkan produktivitas, dimana

pertumbuhan produktivitas tersebut pada gilirannya merupakan motor penggerak pertumbuhan.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah yang kuat. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya perkembangan secara berkelanjutan dalam pembangunan manusia. Sementara sisi lain pengembangan dalam kualitas modal manusia merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi.

5. Pengeluaran Pemerintah

Menurut Mankiw (2001:131) pengeluaran pemerintah mencakup seluruh pembelian berbagai barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah (lembaga dan seluruh tingkatan pemerintah). Sedangkan menurut Mangkoesobroto (1999:169) pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan membeli barang dan jasa.

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat – propinsi – daerah).

Belanja daerah berdasarkan pada Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pengolahan Keuangan Daerah dikelompokkan ke dalam belanja

langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Kelompok belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Secara umum yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah adalah total pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran rutin seperti pemberian gaji pegawai, belanja subsidi dan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang bersifat modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik atau pengeluaran yang ditunjukkan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

Pengeluaran Bidang Pendidikan

Mengacu pada UU No 20 tahun 2003 dimana menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Negara-negara yang maju dapat dilihat dari tingginya tingkat pendidikan masyarakatnya

karena tersedianya pelayanan pendidikan yang menunjang dan memadai. Peranan dominan pemerintah dalam pasar pendidikan tidak hanya mencerminkan masalah kepentingan pemerintah tetapi juga aspek ekonomi khusus yang dimiliki oleh sektor pendidikan, karena karakteristik yang ada pada sektor pendidikan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran pendidikan sebagai investasi.
- 2) Eksternalitas.
- 3) Pengeluaran bidang pendidikan dan implikasinya terhadap kebijakan publik.
- 4) Pengembalian pendidikan.

Menurut Syahril (2008:78)

Semakin meningkat alokasi anggaran pendidikan akan dapat meningkatkan mutu pendidikan yaitu untuk meningkatkan kualitas guru dan untuk membangun sarana dan sarana pendidikan yang lebih baik. Dengan adanya mutu pendidikan yang baik akan mempersingkat rata-rata lama sekolah dan meningkatkan kemampuan dalam membaca dan menulis kemudian akan berpengaruh terhadap kehidupan yang semakin membaik.

Menurut penjelasan di atas pengeluaran sektor pendidikan adalah pengeluaran pemerintah berdasarkan anggaran belanja pemerintah yang digunakan untuk kebutuhan pendidikan seperti gaji guru, biaya pembangunan sarana-prasarana pendidikan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah manfaatnya untuk masyarakat dan kepentingan publik.

Berkaitan dengan masalah pertumbuhan ekonomi pengeluaran pendidikan merupakan pengeluaran wajib pemerintah yang di manfaatkan oleh masyarakat banyak yang di gunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk peningkatan produktifitas masyarakat.

Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah.

Menurut Nanga (2001:302) pada *building human capital* mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pertumbuhan produktifitas dan modal manusia. Pemerintah dapat mempengaruhi pembangunan modal manusia ini melalui kebijakan pendidikan, pelatihan tenaga kerja program-program realisasi dan cara-cara lainnya. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

Implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup / investasi sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapatan dan hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dibawah ini dikemukakan beberapa hasil yang dilakukan di lapangan diantaranya:

Eddy Wibowo Candra (2012) dalam jurnal ekonomi pembangunan yang berjudul “Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri (pmdn) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2010” menyatakan bahwa hasil dari penelitian menunjukkan variabel independent yaitu pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tidak mempunyai hubungan dengan variable ldependent yaitu pertumbuhan ekonomi. Kecuali pertumbuhan ekonomi yang mempunyai hubungan dengan tenaga kerja. Selain itu variabel independent berpengaruh positif dan signifikan kecuali variable penanaman modal dalam negeri yang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adi Raharjo (2006) dalam jurnal ekonomi pembangunan yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-2003 ” menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah (rutine) dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah pada α 10% tetapi variabel Pemerintah pengeluaran (pembangunan) dan angkatan kerja yang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Beda penelitian yang diteliti ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini meneliti tentang tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksud untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukan persepsi penulis tentang keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan perumusan masalah.

Ruang lingkup penulis skripsi ini adalah Sumatera Barat sebagai unit analisis. Dimana variabel analisis yaitu variabel bebas berupa tenaga kerja (X1), tingkat pendidikan (X2) dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X3) sedangkan pertumbuhan ekonomi (Y), sebagai variabel terikat.

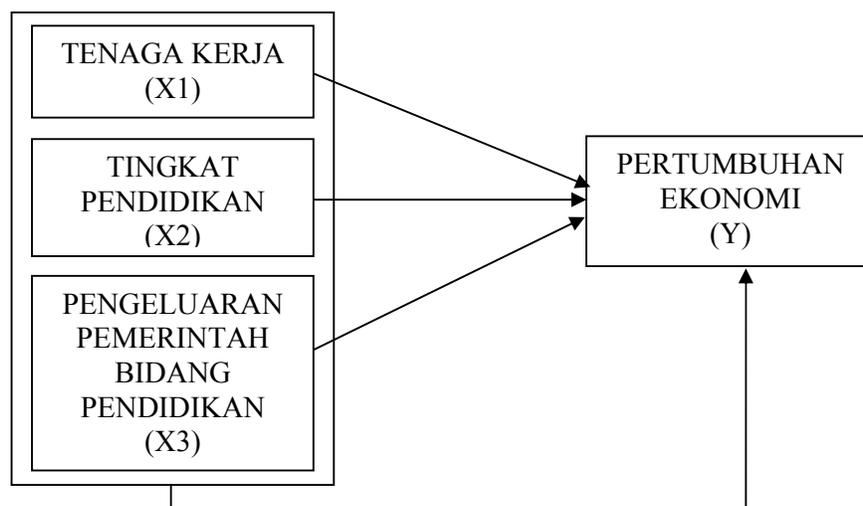
Pengaruh tenaga kerja (X1) terhadap (Y) adalah positif (+) semakin meningkat jumlah tenaga kerja, maka akan semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, suatu daerah hal ini dimungkinkan karena jumlah tenaga kerja berperan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh tingkat pendidikan (X2) terhadap (Y) adalah positif (+) semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, suatu daerah hal ini dimungkinkan karena pendidikan berperan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X3) terhadap (Y) adalah positif (+) semakin tinggi tingkat pengeluaran pemerintah bidang pendidikan maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dimungkinkan karena pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya modal manusia dan produktifitas maka akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jadi secara bersama-sama tenaga kerja (X1), tingkat pendidikan (X2) dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X3) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (Y).

Untuk lebih jelasnya maka dapat digambarkan pada skema yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini.



Gambar 1. Hubungan Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

D. Hipotesis

Dari kerangka konseptual di atas maka dapat di rumuskan suatu hipotesis dalam penulisan ini yaitu diduga:

1. Tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat

$$H_0 : \beta_1 \geq 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_2 \geq 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_3 \geq 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

4. Tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan secara bersama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \geq 0$$

$$H_a : \text{salah satu koefisien regresi parsial } \beta \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan analisis regresi panel dan pembahasan terhadap hasil penelitian, antara variabel bebas yaitu tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi di kabupaten/ kota Sumatera Barat baik secara parsial maupun secara bersama-sama, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera, dimana nilai prob 0,4409 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan ditolak dimana H_0 diterima dan H_a ditolak, seberapapun besarnya perubahan tenaga kerja Sumatera Barat tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat.
2. Dari hasil penelitian, secara parsial tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat, dimana nilai signifikannya sebesar $0.0141 < 0,05$ dengan tingkat pengaruhnya sebesar 1,5858 dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini relevan dengan hipotesis yang diajukan dimana tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka pertumbuhan ekonomi akan

meningkat dan sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun.

3. Dari hasil penelitian, secara parsial pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat dibutuhkan waktu empat tahun, dimana nilai signifikannya sebesar $0.0286 < 0,05$ dengan tingkat pengaruhnya sebesar 0.1906 dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini relevan dengan hipotesis yang diajukan dimana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan sebaliknya semakin rendah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun.
4. Secara bersama-sama tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Sumatera Barat, dimana nilai signifikannya sebesar $0,0119 < 0,05$. Artinya, apabila tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mengalami perubahan maka pertumbuhan ekonomi juga akan berubah. Hasil penelitian ini relevan dengan teori dan asumsi yang dikemukakan oleh beberapa ahli bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada kondisi tenaga kerja, tingkat pendidikan maupun pengeluaran pemerintah bidang pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya serta dari hasil penelitian ini dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat jumlah tenaga kerja tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka perlu dilakukan program-program peningkatan kualitas SDM, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Program-program yang dapat dilakukan antara lain pelatihan-pelatihan teknis maupun nonteknis sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah dan masyarakat saling bahu membahu dalam upaya menyediakan lapangan kerja, sehingga jumlah tenaga kerja yang ada dapat lebih menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang telah ada.
2. Mengingat tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pendidikan bisa dijadikan sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
3. Mengingat pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah Propinsi Sumatera Barat lebih memperbesar pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan harus adanya pengawasan secara ketat agar anggaran pendidikan yang digunakan dapat terealisasi tepat sasaran dan tidak digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

4. Diperlukan peran swasta agar memberikan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat, dengan melaksanakan program-program yang mencerdaskan masyarakat.
5. Disarankan untuk peneliti yang selanjutnya agar lebih mendalami dalam membahas pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Pertumbuh Ekonomi di Sumatera Barat. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji pada ruang lingkup yang berbeda, sehingga efek yang dirasakan dapat memberikan pengaruh yang positif pada bidang-bidang yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Ana Nurul. 2008. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman*. Skripsi UNP.
- Ajija, R. Shochrul, dkk. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews Salemba Empat*: Jakarta
- Arsyad, Lincolin. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Sumatera Barat dalamangka 2009-2011* BPS Sumatera Barat. Sumatera Barat.
- Gujarati, Damador. (2003). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Erlangga. Jakarta.
- . (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Erlangga. Jakarta.
- . (2007). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*. PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta.
- <http://www.bpkp.go.id>. Permendagri No 13 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Online) (Diakses Tanggal 16 Februari 2013)
- http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/8751/1732/ (Online) (Diakses Tanggal 10 Desember 2013)
- <http://www.djpk.depkeu.go.id>. Data APBD (Online) (Diakses Tanggal 10 Februari 2013)
- <http://pusatptk.depnakertrans.go.id> Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016 (Online) (Diakses Tanggal 10 Desember 2013)
- <http://www.republika.co.id> Incar Kenaikan Peringkat, Sumbar Benahi Sektor Pendidikan (Online) (Diakses Tanggal 1 Januari 2014)
- Idris & Yanuarta, Ramel. 2007. *Bahan Ajar Ekonomi Ketenagakerjaan*. Padang: FE UNP.
- Jhingan. M. L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2001. *Pengantar Makro Ekonomi*. Erlangga: Jakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1999. *Ekonomi Publik Edisi 3*. BPFE: Yogyakarta.